

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka yang Sudah Dilaksanakan

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Lincoln Arsyad, 1999). Kebijakan tersebut diharapkan dapat memacu tingkat pertumbuhan ekobomi daerah khususnya ekonomi di pedesaan.

Pengalaman di negara-negara Asia menunjukkan adanya berbagai model mobilisasi perekonomian pedesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu (Mudradjat Kuncoro, 2000): *Pertama*, mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di pedesaan. Ide tenaga kerja yang masih belum didayagunakan pada rumah tangga petani kecil dan gurem merupakan sumberdaya yang tersembunyi dan merupakan potensi tabungan. Alternatif cara yang dapat digunakan untuk memobilisasikan tenaga kerja adalah: menyusun kerangka lembaga di pedesaan yang memungkinkan untuk memberdayakan tenaga kerja pedesaan, terutama industri yang berbasis bahan baku dari pedesaan; *Kedua*, menitikberatkan pada transfer sumberdaya pertanian ke industri melalui mekanisme pasar. Ide bahwa suplai tenaga kerja yang tidak terbatas dari rumah tangga petani kecil dapat meningkatkan tabungan dan formasi modal lewat proses pasar, sehingga terjadi mobilisasi ekonomi pedesaan; *Ketiga*, menyoroti pesatnya pertumbuhan pada sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor memimpin. Model ini dikenal dengan model berbasis teknologi (*Rural-Led Development*). Sektor pertanian tidak hanya sebagai pemasok

sumberdaya (baik pangan, bahan baku, tenaga kerja, atau tabungan), namun sebagai sektor yang mampu meningkatkan permintaan atas produk pertanian dan nonpertanian, karena itu mendukung proses pembangunan seimbang.

Bungaran Saragih (2001a) menyatakan, cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Lebih lanjut diungkapkan oleh Gumbira-Sa'id dan Harizt Intan (2001), agribisnis adalah kegiatan yang sarat dengan penerapan hasil penelitian, perkembangan teknologi, rekayasa, ilmu-ilmu seni dan disain, terutama untuk kemasan produk. Untuk mencapai keberhasilan agribisnis, para pelaku agribisnis perlu menjalankan beberapa hal, antara lain: 1) perencanaan pemanfaatan teknologi untuk tujuan agribisnis secara keseluruhan, 2) pengorganisasian penerapan teknologi secara harmonis pada setiap sub kegiatan agribisnis dari hulu ke hilir, 3) penempatan posisi penerapan teknologi secara optimal, sehingga diperoleh hasil yang maksimal, dan 4) pengawasan teknologi untuk mencapai semua tujuan kegiatan agribisnis dengan berbasis rantai nilai pasokan.

Peranan agribisnis dalam perekonomian Indonesia sangat penting, dan bahkan derajat kepentingannya diduga akan semakin meningkat, terutama setelah sektor industri pertambangan dan minyak bumi mengalami penurunan produksi yang sangat mengkhawatirkan. Penggerakan sektor agribisnis memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait, yakni pemerintah, swasta, petani, maupun perbankan, agar sektor ini mampu memberikan sumbangan terhadap devisa negara. Kebijakan dalam hal peningkatan investasi harus didukung oleh penciptaan iklim investasi Indonesia yang kondusif, termasuk juga dalam birokrasi, akses kredit, serta peninjauan peraturan perpajakan dan tarif pajak untuk sektor agribisnis (Gumbira dan Febriyanti, 2005).

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi

Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Yuswar Zainul Basri, 2003).

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, kebijakan ekonomi harus menganut paradigma baru yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis pertanian, karena sebagian besar hidup mereka pada sektor pertanian. Pelaksanaan pembangunan pertanian di daerah pedesaan harus dirancang dengan sistem agribisnis yang melibatkan berbagai lembaga ekonomi dan lembaga penunjang, antara lain; lembaga ekonomi masyarakat (koperasi), lembaga perkreditan, pengusaha tani (petani), dan pengusaha. Koperasi merupakan pusat kegiatan agribisnis yang tepat untuk setiap unit usaha di pedesaan terutama untuk pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Koperasi berbasis agribisnis harus dapat menunjang berkembangnya subsistem agribisnis (perdagangan sarana produksi pertanian, kegiatan usaha tani, pengolahan hasil pertanian, jasa layanan pendukung), penyedia informasi pasar bagi anggota, dapat menerapkan teknologi pertanian, dan pelaku utama kegiatan agroindustri. Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Agribisnis dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi pedesaan sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan mereka (Almasdi Syahza, 2008b).

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Muhibbullah Azfa Manik (2005) mengungkapkan, program yang perlu dikembangkan berupa pengembangan komoditas unggulan dan andalan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, pengembangan sistem pemasaran, penyediaan sarana pengangkutan dan penyebaran produk, pengembangan kemitraan dan penstruktur-ulangan sistem dan kelembagaan pertanian dan agroindustri, serta memberikan nilai tambah produk pertanian. Pada dasarnya, nilai tambah bukan diukur dari apa yang sudah dilakukan termasuk segala biaya yang harus dikeluarkan, tetapi dari persepsi nilai pada konsumen. Oleh karena nilai tambah diukur dengan persepsi konsumen, maka peran pemasaran termasuk *brand* menjadi penting. Apabila persepsi lebih tinggi

dapat diberikan melalui *value creation* dan dilengkapi dengan aplikasi pemasaran yang benar, maka agroindustri akan memberi sumbangan lebih besar.

Pengembangan komoditas unggulan di daerah akan membuka peluang usaha bagi masyarakat terutama di pedesaan. Menurut Yuswar Zainul Basri (2003), suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Hal kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan. Sejalan dengan itu, Gumbira-Said (2003) juga mengungkapkan, sejauh ini produk hortikultura Indonesia yang diunggulkan meliputi buah mangga, durian, alpukat, pepaya, rambutan, manggis, duku, nenas, jeruk, salak, dan pisang. Kelompok sayuran komoditas unggulannya, adalah kubis, cabai merah, bawang merah, mentimun, jahe, kentang, dan tomat. Di lain pihak, untuk kelompok bebungaan, komoditas unggulannya adalah anggrek, antherium, gladiol, krisan, mawar, melati, dan palem.

Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor perkebunan yang menjadi komoditi unggulan ekspor, antara lain; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa. Bustanul Arifin (2001) menyatakan, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di

daerah (Bustanul Arifin, 2001). Hasil penelitian Almasdi Syahza, (2002), faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis di Daerah Riau untuk masa datang, antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat. Sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain (Almasdi Syahza, 2003a): *Pertama*, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Secara umum pemilikan modal petani masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha tani sebelumnya. Adakalanya petani sering terjatuh pada sistem pinjaman di pedesaan yang secara ekonomi merugikan pihak petani. *Kedua*, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. *Ketiga*, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat. *Keempat*, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. *Kelima*, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. *Keenam*, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan pengembangan terminal agribisnis adalah meningkatkan nilai tambah bagi

penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2003c), kelemahan pengembangan sektor pertanian di pedesaan, juga disebabkan karena adanya kendala dalam pemasaran produk pertanian. Pemasaran dalam kegiatan pertanian dianggap memainkan peran ganda. Peran pertama merupakan peralihan harga antara produsen dengan konsumen. Peran kedua adalah transmisi fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian (konsumen). Namun untuk memainkan kedua peran tersebut petani menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertanian, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang dihadapi pada pemasaran produk pertanian meliputi, antara lain: 1) Kesenambungan produksi; 2) Kurang memadainya pasar; 3) Panjangnya saluran pemasaran; 4) Rendahnya kemampuan tawar-menawar; 5) Berfluktuasinya harga; 6) Kurang tersedianya informasi pasar; 7) Kurang jelasnya jaringan pemasaran; 8) Rendahnya kualitas produksi; 9) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Masalah pemasaran yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari pra panen sampai ke pasca panen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Di samping itu, pembinaan petani selama ini lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarah kepada praktek pemasaran. Hal ini menyebabkan pengetahuan petani tentang pemasaran tetap saja kurang, sehingga subsistem pemasaran menjadi yang paling lemah dan perlu dibangun dalam sistem agribisnis (Almasdi Syahza, 2003a).

Salah satu alternatif mengatasi masalah pemasaran agribisnis di daerah adalah mengembangkan koperasi agribisnis dan terminal agribisnis. Koperasi agribisnis berfungsi sebagai penampung awal dari produk pertanian di daerah atau pedesaan, sedangkan terminal agribisnis berfungsi sebagai sarana pemasarannya. Menurut Nuhung Iskandar (2001), sasaran kegiatan pengembangan terminal agribisnis adalah: meningkatkan nilai tambah bagi

petani, mendidik petani untuk memperbaiki kualitas produksi, merubah pola pikir petani ke arah pola agribisnis, dan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dari sisi lain Setiadi Wijaya (2002) mengungkapkan, manfaat berkoperasi: 1) membantu meningkatkan standar sosial ekonomi di daerah dengan memanfaatkan potensi dan penyerapan tenaga kerja; 2) bermanfaat langsung, karena sesuai dengan kehidupan masyarakat pedesaan; dan 3) ekonomi pedesaan bisa tumbuh karena koperasi berakar kuat di pedesaan.

Dalam upaya pembangunan ekonomi di pedesaan, pemerintah Propinsi Riau mengambil satu kebijakan yaitu pembangunan sektor pertanian yang difokuskan di daerah pedesaan. Untuk pembangunan ekonomi pedesaan tersebut pemerintah daerah telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan kelapa sawit sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2005).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap

tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Almasdi Syahza, 2004).

Dari dua sisi perkembangan ekonomi pedesaan berbasis pertanian, yaitu pertama, pengembangan subsektor perkebunan yang memberikan hasil pendapatan yang lebih tinggi kepada petani; kedua, pengembangan subsektor non perkebunan (hortikultura, pangan) yang kenyataannya memberikan hasil lebih rendah dari subsektor perkebunan. Dari dua sisi ini tentu saja terjadi kesenjangan pendapatan keluarga di pedesaan. Jika ini dipertahankan, maka dalam jangka panjang akan muncul perubahan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan. Yang tak kalah pentingnya akan muncul gejala kecemburuan sosial karena adanya kesenjangan pendapatan di pedesaan.

Untuk itu perlu dirancang model pembangunan ekonomi pedesaan berbasis pertanian (agribisnis). Rancangan ini diharapkan akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan baik dari subsektor perkebunan maupun non perkebunan. Hasil penelitian ini dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan pertanian ke depan dan strategi untuk pembangunan ekonomi pedesaan.

2.2. Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis

Program pembangunan pertanian pada hakikatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional (Departemen Pertanian, 2001).

Program pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan

menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Tujuan program ini adalah mengembangkan, antara lain: 1) subsistem hulu; 2) subsistem *on-farm*; 3) subsistem pengolahan; 4) subsistem pemasaran; dan 5) subsistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis. Sasaran program adalah berkembangnya: 1) semua subsistem agribisnis secara serasi dan seimbang; dan 2) usaha-usaha agribisnis (Departemen Pertanian, 2001).

Sektor agribisnis merupakan lapangan kerja yang berperan besar dalam penurunan tingkat pengangguran. Karena itu pengembangan pertanian sudah seharusnya dipusatkan kepada pengembangan produktivitas yang dicapai melalui manajemen agribisnis yang ditata dengan baik. Agribisnis mencakup keseluruhan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usahatani dan pemasarannya sehingga produksinya sampai pada konsumen akhir. Agribisnis meliputi seluruh sektor bahan masukan usahatani, terlibat dalam proses produksi, dan pada akhirnya menangani pemrosesan, penyebaran, penjualan secara borongan dan enceran produk kepada konsumen akhir. Agribisnis merupakan sektor perekonomian yang menghasilkan dan mendistribusikan masukan bagi pengusahatani, memasarkan, dan memproses serta mendistribusikan produk usahatani kepada pemakai akhir (Downey, W. David, Steven P Erickson, 1987).

Dimasa lalu (PJP I), sebagian rakyat kita berada pada mata rantai yang memberikan nilai tambah kecil (pertanian primer) dalam keseluruhan kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian, mulai dari industri hulu hingga hilir, sehingga wajar jika pendapatan petani kita rendah. Sementara mereka yang menguasai mata rantai kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah terbesar seperti industri hulu dan hilir pertanian beserta kegiatan perdagangannya, mampu berkembang dan menjadi konglomerat besar. Oleh sebab itu kita perlu memperkuat ekonomi rakyat agar mampu merebut nilai tambah yang besar. Menurut Bungaran Saragih (2001b) dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*). Industrialisasi menjamin iklim makro kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian.

Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian.

Lebih lanjut Bungaran Saragih (2001a) menyatakan, cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi nasional yang memberikan prioritas pada pengembangan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional. Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Pembangunan pedesaan yang berbasis agribisnis harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh Friedmann, J dan Mike Douglass dalam Almasdi Syahza (2004) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, merubah daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah

tempat permukiman di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang.

Kedua, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*).

Ketiga, memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru.

Keempat, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama.

Kelima, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap *agropolitan district*, termasuk peningkatan hasil pertanian.

Keenam, merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara *agropolitan district* dengan kota.

Ketujuh, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya.

Kedelapan, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan dengan cara: a) menanam kembali bagian terbesar dari tabungan setempat di tiap-tiap distrik; b) mengadakan sistem bekerja sebagai pengganti pajak bagi semua anggota masyarakat yang telah dewasa; c) mengalihkan dana pembangunan dari pusat-pusat kota dan kawasan industri khusus untuk pembangunan agropolitan; dan d) memperbaiki nilai tukar barang-barang yang merugikan antara petani dan penduduk kota agar lebih menguntungkan petani.

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor perkebunan yang salah satunya

menjadi komoditi unggulan adalah kelapa sawit. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kelapa sawit dapat memberikan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tanaman lainnya. Sementara komoditas kelapa, karet sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan dari pandangan dan pengalaman mereka selama ini kedua komoditas tersebut belum bisa menjamin tingkat kesejahteraan keluarga.

Menurut Muhibbullah Azfa Manik (2005), pada umumnya budaya petani di pedesaan pada saat ini dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga, jadi belum berorientasi pada pasar (*market oriented*). Terdapat beberapa kendala utama dalam pengembangan pertanian yang berbasis agribisnis. Kendala itu disebabkan masih rendahnya kemampuan teknologi, kualitas sumberdaya manusia (SDM), koordinasi dan sinkronisasi program kelembagaan, belum terciptanya iklim yang kondusif, dan infrastruktur pendukung pengembangan agrobisnis dan agroindustri yang masih terbatas, serta masih langkanya SDM berkualitas yang tertarik menekuni agroindustri terutama di perdesaan. Di bidang teknologi masih dihadapkan pada keterbatasan untuk menyediakan teknologi yang tepat guna dan memberikan nilai tambah yang signifikan dan siap digunakan (*instant*). Hal demikian menyebabkan masih tingginya ketergantungan teknologi luar negeri untuk pengolahan produk pertanian. Ini berdampak pada masih rendahnya produktivitas, efisiensi dan pendapatan relatif pelaku agrobisnis dan agroindustri.

Tantangan pertanian di era industrialisasi dan perdagangan bebas menuntut penguatan pertanian melalui model-model baru. Model pembangunan pertanian dengan paradigma modernisasi yang secara praksis terlihat melalui revolusi hijau ternyata hanya mampu mendongkrak tingkat produksi. Sementara kesenjangan sosial ekonomi di pedesaan masih tampak besar. Paradigma pertanian industrial yang dikembangkan secara jeli dengan mempertimbangkan aspek budaya dan struktur sosial dapat menjadi alternatif bagi model pertanian masa depan.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain

saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga*, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

2.3. Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat. Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, nelayan, petani tradisional (subsisten), dan nelayan (Tulus TH. Tambunan, 2001)

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan nonpetanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota dan

pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial.

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan daerah tertinggal akan semakin tertinggal sementara yang maju akan tetap semakin maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan sulit dikejar. Penyebabnya adalah perbedaan sumberdaya manusia (SDM), pertumbuhan awal dan hasil pembangunan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya, sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan pemerintah dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah lain (Almasdi Syahza, 2001).

Dari sisi lain tentang penyebab kesenjangan ekonomi menurut Muhammad Kholikul Alim (2007) menilai di dalam negeri kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal industri di kota-kota ketimbang rakyat pedesaan. Di tingkat desa, pemerintah lebih banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan sebagian kecil elit desa daripada sebagian besar buruh tani. Contohnya adalah proyek intensifikasi pertanian yang menghasilkan hasil tani melimpah. Teknologi dan tatacara bertani dimoderenkan. Petani bisa panen dua-tiga kali setahun. Banyak petani *naek* haji. Ilmuwan menyebutnya revolusi hijau.

Kebijakan ini menyebabkan pihak yang diuntungkan adalah elit desa. Alasannya yaitu, tidak semua penduduk desa punya lahan. Cuma sedikit yang punya lahan banyak. Sebagian besar penduduk desa itu buruh tani tanpa lahan. Naiknya produksi pertanian lebih dinikmati pemilik lahan saja. Sejak revolusi hijau, modal untuk menanam padi lebih besar. Petani harus beli bibit, pupuk, pestisida, dan sewa traktor. Jelas hanya petani kaya yang relatif tidak terlalu sulit menjalankannya. Sejak ada traktor buruh-buruh *macul* banyak kehilangan pekerjaan. Selain itu untuk jadi anggota kelompok tani orang harus menjadi pemilik lahan karena bantuan dari pemerintah seperti penyuluhan, pinjaman

modal, dan kredit teknologi tani diprogramkan untuk pemilik lahan; bukan untuk buruh tani.

Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Kekurangan tersebut akan menyebabkan rendahnya kemampuan berproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga.

Untuk mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Di dalam sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha petanian, perikanan, dan perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi. Untuk keberhasilan program ini adalah penting bahwa program bimbingan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan untuk beberapa periode dan dievaluasi.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dan harapan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat pedesaan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan dan Harapan pada Masyarakat Pedesaan

Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan
Kurangnya budaya kewirausahaan	Pertanian yang berorientasi pasar
Belum berfungsinya lembaga ekonomi pedesaan (koperasi)	Tersedianya pelayanan lembaga ekonomi pedesaan yang memadai bagi masyarakat
Rendahnya kemampuan sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi
Tingkat penguasaan ilmu dan teknologi yang rendah	Peningkatan ilmu dan penguasaan teknologi yang bisa mendukung inovasi.
Kurangnya informasi/penguasaan pasar	Peningkatan sistem manajemen informasi dan perluasan pangsa pasar
Keterbatasan modal untuk investasi dan modal kerja	Kecukupan modal guna pengembangan usaha dan kelanjutan usaha
Belum memiliki bentuk organisasi dan manajemen yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat	Terbentuknya organisasi yang mampu menghadapi perubahan lingkungan dengan cepat dan manajemen yang profesional
Masih dirasakan adanya budaya lebih menyukai produk impor oleh sebagian konsumen	Adanya budaya cinta produk nasional
Masih kurangnya <i>political will</i> pemerintah	Adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani

2. 4. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Dengan adanya krisis ekonomi yang melanda pada masa lalu telah menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijaksanaan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan pertanian dan industri yang berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimport atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang.

Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat.

Di Indonesia sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik. Lebih lanjut diungkapkan Haryono Suyono (2007), dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan kokoh, sehingga di pedesaan dapat tercapai swasembada berbagai produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era pengindustrian. Lebih khusus, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu dan pertanian harus mendapatkan prioritas utama.

Pengembangan sektor pertanian ke depan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Menurut Bungaran Saragih (2001a), sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat pedesaan

juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih (Muhammad Basri, 2007).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Di pedesaan sebagian besar penduduknya menggantungkan nasibnya kepada sektor pertanian. Karena itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan diperlukan konsistensi. Hal itu harus menjadi konsepsi yang benar-benar memungkinkan masyarakat pedesaan untuk dapat bertahan dalam situasi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini. Selain itu, meningkatkan harkat dan martabat serta kemampuan dan kemandirian yang nantinya dapat menciptakan suasana kondusif. Jadi, hal itu memungkinkan masyarakat pedesaan untuk berkembang dan memperkuat daya saing serta potensi yang dimiliki.

Lebin¹ lanjut diungkapkan oleh Muhammad Basri (2007), pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih. Pembangunan pedesaan yang efektif tidak saja akan mewujudkan pembagian kekayaan dan pendapatan yang merata, tetapi juga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang pesat karena berhasil mendorong berkembangnya industrialisasi. Dengan kata lain, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kalau kesejahteraan sudah tercapai, pasti kepentingan lain akan lebih mudah lagi dicapai.